

# Akses

JURNAL PENELITIAN ILMU SOSIAL dan BUDAYA

Persiapan Pelaksanaan Pp Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Bengkulu

**YORRY HARDAYANI** | Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Bengkulu

Analisis Rendahnya Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Governance Index*) Provinsi Bengkulu

**HERI SUNARYANTO** | Jurusan Sosiologi Universitas Bengkulu

Analisis Faktor-Faktor Penyebab Penyimpangan Pemanfaatan Ruang Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis Di Kawasan Danau Dusun Besar Kota Bengkulu

**ALIMANSYAH** | Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Bengkulu

Konstruksi Sosial Kampung Ramah Anak : Studi Fenomenologi Atas Implementasi Program Kampung Ramah Anak Di Rw 11 Kampung Badran Kota Yogyakarta

**IKA PASCA HIMAWATI** | Jurusan Sosiologi Universitas Bengkulu

Aturan Kampanye Pemilu Legislatif 2014 Dari Sudut Pandang Anggota Partai Politik

**SATRIO BUDIMAN, TITIEK KARTIKA, HENDRASTITI ADITYO, PRATIKNO RAMADHAN** | Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Bengkulu

Tafsir Sosial Atas *Celako Kemali* Dalam Praktik Perladangan Komunitas Serawai Di Bengkulu

**PANJI SUMINAR** | Jurusan Sosiologi Universitas Bengkulu

Peranan Lembaga Adat Bengkulu Dalam Penanganan Masalah Sosial (Studi Kasus Di Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muarabangkahulu Kota Bengkulu)

**YESSILIA OSIRA, SUPLAHAN GUMAY, CUCU SYAMSUDIN** | Jurusan Kesejahteraan Sosial Universitas Bengkulu



**AKSES**  
**JURNAL PENELITIAN ILMU SOSIAL DAN BUDAYA**  
**Terbit sejak Februari 2004**

ISSN 1693 - 8356

VOLUME 11 NO. 1, FEBRUARI 2014, HALAMAN 1-94

Alamat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu  
Jl. WR Supratman Kandang Limun Bengkulu

---

Terbit dua kali setahun pada bulan Februari dan Agustus. Memuat tulisan yang bersumber dari hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan budaya.

Penanggung Jawab  
Drs. Hasan Pribadi, Ph.D

Dewan Redaksi  
Dr. Titiek Kartika, MA  
Dr. Panji Suminar, MA  
Dr. Lely Arrianie, M.Si  
Dr. Yunilisiah, M.Si

Redaksi Pelaksana  
Wahyu Widiastuti, S.Sos, M.Sc  
Nursanty, S.IP, M.Si  
Alfarabi, S.Sos, MA

Tata Usaha  
Melly Octaria, SE.Akt

AKSES  
**JURNAL PENELITIAN ILMU SOSIAL DAN BUDAYA**  
**Terbit sejak Februari 2004**

ISSN 1693 – 8356

VOLUME 11 NO.1 , FEBRUARI 2014, HALAMAN 1-94

Alamat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu  
Jl. WR Supratman Kandang Limun Bengkulu

---

**DAFTAR ISI**

Persiapan Pelaksanaan PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Yorry Hardayani	1-17
Analisis Rendahnya Indeks Tata Kelola Pemerintahan ( <i>Governance Index</i> ) Provinsi Bengkulu Heri Sunaryanto	18-31
Analisis Faktor-Faktor Penyebab Penyimpangan Pemanfaatan Ruang Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis Di Kawasan Danau Dusun Besar Kota Bengkulu Alimansyah	32-39
Konstruksi Sosial Kampung Ramah Anak : Studi Fenomenologi Atas Implementasi Program Kampung Ramah Anak Di Rw 11 Kampung Badran Kota Yogyakarta Ika Pasca Himawati	40-51
Aturan Kampanye Pemilu Legislatif 2014 Dari Sudut Pandang Anggota Partai Politik Satrio Budiman, Titiek Kartika, Hendrastiti Adityo, Pratikno Ramadhan	52-65
Tafsir Sosial Atas <i>Celako Kemali</i> Dalam Praktik Perladangan Komunitas Serawai Di Bengkulu Panji Suminar	66-80
Peranan Lembaga Adat Bengkulu Dalam Penanganan Masalah Sosial (Studi Kasus Di Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muarabangkahulu Kota Bengkulu) Yessilia Osira, Suplahan Gumay, Cucu Syamsudin	81-94

# ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENYIMPANGAN PEMANFAATAN RUANG ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH BERIRIGASI TEKNIS DI KAWASAN DANAU DUSUN BESAR KOTA BENGKULU

Alimansyah

Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Bengkulu  
alimansyah79@yahoo.co.id

## ABSTRACT

Utilization of space in the city of Bengkulu still a deviation occurs, the conversion of technical irrigated rice land in the area of Danau Dendam Tak Sudah Dusun Besar are one form of distortion that occurs. Danau Dendam Tak Sudah Dusun Besar in the Regional (Regional Regulation) No. 1 of 1995 on Spatial Planning (Spatial) is the city of Bengkulu Agriculture, but the reality on the ground found the use of wetland that has been converted to houses, store houses, and buildings swallow nest in principle violate Space Planning. The results showed that the factors that cause the conversion of technical irrigated rice field, namely: First, the existence of land-uses in Danau Dendam Tak Sudah Dusun Besar Nature Reserve which result in reduced water that could irrigate the paddy fields around the Danau Dendam Tak Sudah Dusun Besar region. Second, the Transfer function is due to inaccuracies when determining PERDA RTRW Bengkulu city. Third, the weak control of space, and the Fourth, spatial competition, especially by owners of capital. Based on the factors that cause the conversion of irrigated rice fields is technically the spatial deviations occur at all spatial processes ranging from Space Planning, Land Use and Control Room.

**Keywords:** Deviations, Land Use, Transfer Function, Danau Dusun Besar.

## PENDAHULUAN

Secara umum pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya (Budiman;1995), adapun tujuan pembangunan adalah untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, jangka pendek, menengah, maupun panjang. Oleh sebab itu penataan ruang mulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, nasional, wilayah maupun daerah (kabupaten/kota), harus menjadi acuan (referensi) dalam penyelenggaraan pembangunan di Indonesia. Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan yaitu pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan penataan ruang, namun hal ini

masih banyak terganjal oleh berbagai permasalahan nasional maupun daerah. Menurut Ernawi (2008;2), "*Masih banyak terjadi inkonsistensi kebijakan terhadap penataan ruang dan kelemahan dalam pengendalian ruang yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang sehingga terjadi penyimpangan seperti alih fungsi lahan sawah*". Fakta permasalahan penataan ruang secara nasional, sejalan dengan beberapa permasalahan penataan ruang yang terjadi di daerah seperti di kota Bengkulu yaitu penyimpangan pemanfaatan ruang berupa alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis di kawasan Danau Dusun Besar. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius saat ini berkaitan dengan lahan pangan yaitu



makin maraknya alih fungsi lahan pangan ke penggunaan lainnya (Astuti dkk :2011).

Kawasan Danau Dusun Besar dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota Bengkulu dibagi menjadi dua kawasan yang saling berkaitan, yaitu kawasan Cagar Alam dan kawasan budidaya pertanian yaitu lahan sawah irigasi teknis yang berasal dari Danau Dusun Besar, hal ini sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 1995 dan PERDA Nomor 14 Tahun 2014 (Revisi) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Bengkulu. Keterpaduan kedua kawasan ini juga dapat dilihat dari fungsinya selama ini yang sudah berjalan selama ratusan tahun, baik untuk perlindungan keanekaragaman hayati maupun sebagai sumber irigasi bagi 1000 hektar lebih lahan sawah beririgasi teknis di kawasan Danau Dusun Besar dan sekitarnya, hal inilah yang menjadikan mengapa perlunya menjaga kelestarian dan melindungi kawasan Danau Dusun Besar.

Namun sampai saat ini, di kawasan Danau Dusun Besar masih saja terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang berupa alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis, terutama areal sawah yang berada di sepanjang jalan Danau. Penyimpangan Pemanfaatan Ruang alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis ini seperti adanya lahan sawah yang berubah fungsi untuk Rumah permukiman, Rumah toko, Sarang walet dan Kolam Ikan.

Hal ini penting mengingat kawasan dusun besar terdapat lahan pertanian produktif yang merupakan aset penting dalam pembangunan pertanian karena hal ini didasarkan atas dua hal yaitu besarnya biaya investasi yang harus dikeluarkan dalam bentuk sarana dan prasarana irigasi dan pencetakan sawah baru serta lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membuat sawah baru hingga terbentuknya lahan sawah dengan tingkat produktivitas yang tinggi (Catur *et al.*, 2010). Akibat terjadinya alih fungsi lahan sawah beririgasi, menyebabkan berkurangnya

luas lahan panen, menurut hasil temuan investigasi Berita Harian Rakyat Bengkulu (2010) menyatakan bahwa "*Sejak tahun 2005 sampai 2009 terjadi penciptaan lahan sawah beririgasi teknis di Dusun Besar seluas 9,52 % atau sekitar 10 hektar yang telah beralih fungsi dari sebelumnya yaitu berupa sawah*". Hal ini menyebabkan jumlah panen/tahun dan produksi padi oleh petani semakin menurun. Menurut data dinas Pertanian dan Peternakan kota Bengkulu (2010) menunjukkan bahwa "*Telah terjadi penurunan produksi padi yang cukup drastis dari tahun 2006 s/d 2009 yaitu dari 13.335 ton/tahun menjadi 9.078 ton/tahun*" menurunnya hasil produksi berimbas pada ketahanan pangan di kota Bengkulu. Selain itu berdampak pada pendapatan petani yang menurun dan harga beras yang semakin meningkat yang dirasakan masyarakat akibat harus mengimpor beras dari daerah atau negara lain.

Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "*Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penyimpangan pemanfaatan ruang Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis Di Kawasan Danau Dusun Besar Kota Bengkulu ?*". Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang berupa alih fungsi lahan sawah di kawasan dusun besar.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, fokus penelitian adalah untuk menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan penyimpangan pemanfaatan ruang berupa alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis di kawasan Danau Dusun Besar. Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak subjektif maka peneliti akan menggali data pada Pemerintah Daerah melalui Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang berwenang, kelompok petani,



kelompok tani pemakai air, LSM dan seluruh pihak terkait yang intens menyoroti masalah alih fungsi lahan di Kawasan Danau Dusun Besar. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, untuk mengumpulkan data penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, teknik wawancara mendalam (*deep interview*) dan dokumentasi. Adapun instrumen penelitian adalah peneliti sebagai instrumen kunci (*key instrument*), dan *Interview Guide* (daftar pertanyaan turunan). Analisis yang digunakan adalah model analisis kualitatif, yang menurut Miles dan Huberman (1992) terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Pertama, Reduksi Data. Kedua, Penyajian Data (*Display Data*). Ketiga, Menarik Kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Geografis

Kawasan Danau Dusun Besar secara geografis terletak diantara  $3^{\circ} 47' 45'' - 3^{\circ} 49' 01''$  Lintang Selatan dan  $102^{\circ} 18' 07'' - 102^{\circ} 20' 15''$  Bujur Timur. Bila dilihat dari tofografinya kawasan Danau Dusun Besar pada umumnya relatif datar sampai bergelombang dengan kemiringan atau kelerengan 0-8%, sedangkan ketinggian dari permukaan laut rata-rata 15 meter, dan memiliki batas-batas wilayah administrasi pemerintahan yang termasuk dengan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah barat berbatasan dan termasuk dengan kecamatan Sungai Serut dan kecamatan Ratu Agung.
- b. Sebelah utara berbatasan dan termasuk dengan kecamatan Sungai Serut dan kecamatan Muara Bangkahulu.
- c. Sebelah Timur berbatasan dan termasuk dengan kecamatan Gading Cempaka dan Karang Tinggi serta kecamatan Talang Empat (Kabupaten Bengkulu Tengah).

- d. Sebelah selatan berbatasan dan termasuk dengan kecamatan Gading Cempaka dan kecamatan Selebar.

Kawasan Danau Dusun Besar tersebut dikelilingi oleh 8 (Delapan) desa atau kelurahan penyangga yang dihuni oleh hampir menyeluruh oleh masyarakat adat suku Lembak yang sudah sejak dahulu atau sekitar 500 (lima ratus) tahun yang lalu telah berdomisili dan berinteraksi secara simbiosis mutualisme dengan ekosistem Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) atau Danau Dusun Besar. Secara umum Kawasan Danau Dusun Besar bisa dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu kawasan hulu dan hilir atau kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar dan kawasan penyanggahnya. Sedangkan kawasan hilir Danau Dusun Besar adalah termasuk kawasan budidaya, dalam hal ini budidaya pertanian lahan basah berupa lahan sawah beririgasi teknis yang bersumber dari buangan air Danau Dendam Tak Sudah yang mengairi luas sawah pada awalnya seluas  $\pm 700$  Ha. Penetapan lahan pertanian berupa sawah beririgasi teknis dikawasan Danau Dusun Besar ini dikarenakan disesuaikan dengan kondisi kesesuaian lahan yang didalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Bengkulu merupakan wilayah kesesuaian lahan III (tiga) adalah lahan yang memiliki kestabilan tinggi sampai dengan sedang dimana penggunaan lahannya diperuntukkan untuk sawah yang harus dipertahankan kecuali bila keadaan memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan sebagai lahan pertanian pangan berupa sawah.

### Sejarah Kawasan Danau Dusun Besar

Berdasarkan fakta sejarah yang telah berlangsung lama, menunjukkan bahwa kawasan "Danau Dendam Tak Sudah" atau "Cagar Alam Danau Dusun Besar" merupakan hak bagi masyarakat adat Lembak untuk dapat mengelola dan mengambil manfaat dari kawasan ini. Apalagi dalam sistem hukum Nasional,



Hak-hak adat sangat dilindungi keberadaannya. Dalam naskah surat keputusan (SK) penetapan Kawasan Cagar Alam oleh Gubernur Hindia Belanda di Bengkulu, pada tanggal 17 Juni 1936 nomor 36 yaitu seluas 11,5 ha, secara jelas dibuktikan bahwa kawasan tersebut adalah milik marga Proatin XII yang notabene adalah masyarakat Lembak, bahkan diakui sebagai Hak Ulayat masyarakat Lembak.

Penegasan bahwa kawasan Danau Dusun Besar "Cagar Alam Danau Dusun Besar" pada mulanya sebagai hak ulayat sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh UY dari Yayasan Lembak yang menyatakan bahwa :

"Pada awalnya Danau Dusun Besar merupakan satu kawasan, namun dikarenakan adanya penetapan wilayah kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar oleh pemerintah maka masyarakat yang memiliki tanah diarel tersebut mau melepaskan hak kepemilikan tanahnya yang kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar, hal ini mereka lakukan karena perlunya untuk menjaga kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar yang merupakan sumber air yang mengairi sawah yang berada dikawasan Danau Dusun Besar dan sekitarnya"

Kemudian berdasarkan Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 166/B4-1/1979 tanggal 15 Mei 1979 luasan Cagar Alam Danau Dusun Besar ditambah menjadi seluas  $\pm 430$  ha. Selanjutnya di perkuat dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 171/Kpts/UM/3/1981 tanggal 3 Maret 1981 seluas  $\pm 430$  hektar sebagai cagar alam. Akhirnya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 383/Kpts-II/1985 tanggal 27 Desember 1985 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) ditindak lanjuti dengan pemancangan batas sementara tahun 1985 dengan berita acara pada bulan September 1985. Pemancangan Batas Definitif dilakukan pada tahun 1985, dengan berita acara tanggal 18 Januari 1986 dan pengesahan batas pada bulan

Februari 1992 oleh Menteri Kehutanan, yang selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 602/Kpts-II/1992 tanggal 10 Juni 1992 ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan Cagar Alam seluas 577 ha.

Kawasan Danau Dusun Besar yang dijadikan Cagar Alam Danau Dusun Besar memiliki 2 (dua) tipe ekosistem yaitu : ekosistem perairan danau seluas  $\pm 90$  Ha yang terdiri dari genangan perairan danau seluas  $\pm 69$  Ha dan zona habitat tumbuhan bakung-bakungan yang menjadi inang bagi anggrek pensil (*Vanda hokeriana*) seluas 21 Ha. Sisanya  $\pm 487$  Ha merupakan zona ekosistem hutan rawa air tawar dengan vegetasi hutan rawa air tawar, zona ini merupakan kawasan tangkapan air (*catchment area*) bagi zona perairan danau.

Dengan adanya penetapan kawasan Danau Dusun Besar sebagai wilayah cagar alam yang di dalamnya terdapat Danau Dendam Tak Sudah yang memberikan pengairan bagi irigasi teknis yang ada dikawasan hilirnya, maka secara zonasi jelas bahwa kawasan ini terdiri dari Kawasan lindung dan kawasan budidaya pertanian lahan basah berupa sawah beririgasi teknis yang mengairi luas sawah sekitar  $\pm 700$  hektar dikawasan Danau Dusun Besar dan sekitarnya. Penetapan lahan pertanian sawah dikawasan Danau Dusun Besar kota Bengkulu sudah ditetapkan didalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 tahun 1995 tentang rencana tata ruang wilayah kota Bengkulu. Namun sampai dengan saat ini Peraturan Daerah nomor 1 tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Bengkulu yang berakhir tahun 2005 yang sempat direvisi pada tahun 2005 belum juga ditetapkan sebagai ketetapan Peraturan Daerah yang baru sehingga sampai penelitian ini dilakukan (2011) telah terjadi kekosongan hukum secara resmi tentang kawasan ini.

Namun dikarenakan kawasan ini merupakan kawasan pertanian lahan sawah beririgasi teknis, tentu banyak sekali peraturan perundang-undangan yang



mengatur tentang pengendalian alih fungsi tanah pertanian dikawasan ini terutama Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus mempertimbangkan budidaya tanaman pangan atau sawah irigasi teknis, sehingga perubahan fungsi ruang kawasan pertanian menjadi kawasan pertambangan, permukiman, kawasan industri, dan sebagainya memerlukan kajian dan penilaian atas perubahan fungsi ruang tersebut secara lintas sektor, lintas daerah, dan terpusat.

Serta pengaturan penataan ruang kawasan pangan ditujukan untuk pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Sawah Berkelanjutan. Sedangkan untuk mencegah alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis yang berada di kawasan danau dusun besar, maka sebagai turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka Pemerintah daerah kota Bengkulu untuk sementara mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 20 tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Sawah Berkelanjutan kota Bengkulu. Dengan demikian masih ada aturan yang sama maupun aturan antar sektor baik secara vertikal ataupun horizontal yang mengatur tentang kawasan Danau Dusun Besar kota Bengkulu sesuai dengan potensi dan fungsinya selama ini yaitu menjadi kawasan budidaya lahan pertanian berupa lahan sawah beririgasi teknis dari Cagar Alam Danau Dusun Besar (CADDDB) atau Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) yang harus dijaga dan dilindungi sesuai dengan potensi-potensi dan fungsi kawasan.

### Potensi Kawasan

Adapun potensi-potensi tersebut menurut UY/yayasan Lembak (2009), dari hasil analisis yang telah dilakukan secara

menyeluruh yaitu : Potensi Ekologi, Potensi Ekonomi, Potensi Sosial dan Potensi Identitas Budaya. Berdasarkan beberapa analisa tentang potensi-potensi yang ada di kawasan Danau Dusun Besar kota Bengkulu, potensi-potensi tersebut akan terus berkurang bahkan hilang apabila alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis terus saja terjadi, oleh sebab itu perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi teknis dan penegakan peraturan tentang kawasan Danau Dusun Besar sangat diperlukan untuk mempertahankan dan menjaga kawasan ini agar bisa diperuntukkan sesuai dengan fungsinya di dalam RTRW kota Bengkulu sesuai dengan potensi yang ada.

### Faktor-Faktor Penyebab Alih Fungsi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan tentang Faktor-Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis di Kawasan Danau Dusun Besar kota Bengkulu, maka ditemukan beberapa penyebabnya yaitu sebagai berikut :

#### 1. Penyimpangan Alih Fungsi Lahan yang dilakukan dikawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar (CADDDB).

Faktor penyebab dari hulu berupa adanya penyimpangan alih fungsi lahan yang dilakukan juga dikawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar (CADDDB) kota Bengkulu yaitu berupa jalan yang membelah kawasan Cagar Alam, adanya sawah, kebun sawit dan perumahan dikawasan *catchment area*. Hal ini telah membuat pasokan air ke danau Dendam menjadi berkurang sehingga permukaan danau menjadi turun 2 sampai 3 meter dari kondisi normal. Kondisi inilah yang menyebabkan Danau Dusun Besar atau Danau Dendam Tak Sudah tidak bisa lagi menyuplai air untuk sawah beririgasi teknis secara keseluruhan yaitu lebih dari 1000 hektar, yang akhirnya membuat sebagian lahan sawah beririgasi teknis



berubah menjadi sawah tadah hujan dan menjadi lahan tidur disaat musim kemarau.

## 2. Kelalaian Pembuat Kebijakan Daerah (DPRD Dan Pemerintah Daerah) Dalam Merevisi Perda Sesuai Kondisi.

Kelalaian pembuat kebijakan daerah (DPRD dan Pemerintah Daerah) sehingga menyebabkan ketidaktepatan penetapan PERDA Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Bengkulu sesuai dengan waktu yang seharusnya. Hal ini telah menimbulkan banyak multitafsir hukum yang berbeda-beda tentang peruntukan suatu kawasan yang akhirnya membuka celah untuk terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang berupa alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis.

## 3. Lemahnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Lemahnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Pengawasan lemah, Perizinan oleh oknum aparat dan Penertiban atau Penegakan hukum tidak tegas) telah menyebabkan alih fungsi lahan terjadi di kawasan sawah beririgasi teknis Danau Dusun Besar, seperti alih fungsi untuk Rumah toko (Ruko), Rumah sarang walet, Rumah tinggal dan Kebun sawit terus terjadi.

## 4. Persaingan Pemanfaatan Ruang

Adanya persaingan pemanfaatan ruang yang dipicu oleh adanya pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, serta keterbatasan sumberdaya lahan yang terbatas (tetap), telah meningkatkan nilai harga lahan semakin tinggi, yang membuat pemilik lahan sawah bimbang dan menjual lahannya kepada pemilik modal. Selain itu penetapan kota Bengkulu sebagai pusat kegiatan provinsi dan kawasan Danau Dusun Besar masuk ke dalam wilayah pengembangan pusat kota serta keinginan Pemerintah Daerah yang menjadikan Danau Dusun Besar sebagai tempat wisata alam telah menjadikan lahan dikawasan ini menjadi rebutan semua pihak terutama pemilik modal.

Berdasarkan analisa hasil penelitian tentang faktor-faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis di kawasan

Danau Dusun Besar kota Bengkulu. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyimpangan terjadi pada semua proses penataan ruang mulai dari Perencanaan Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Ruang, sebagaimana digambarkan di dalam Tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 Penyebab Penyimpangan Pemanfaatan Ruang  
Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis di Kawasan Dusun Besar

Faktor-Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis di Kawasan Danau Dusun Besar	Ketidaktepatan Penetapan Perencanaan Penataan Ruang	Persaingan Pemanfaatan Ruang	Lemahnya Pengendalian Ruang
	Terjadinya kekosongan hukum berupa Perda tata ruang sejak 2005 sd sekarang & Multitafsir terhadap hukum /kebijakan daerah	Pembangunan Rumah	Perizinan IMB
		Pembangunan Rumah Toko	Pengawasan irigasi lemah
	RTRW yang kurang sinergis dengan aturan yang lebih tinggi	Pembangunan Sarang Walet	Penegakan hukum lemah (law enforcement)
		Kolam	

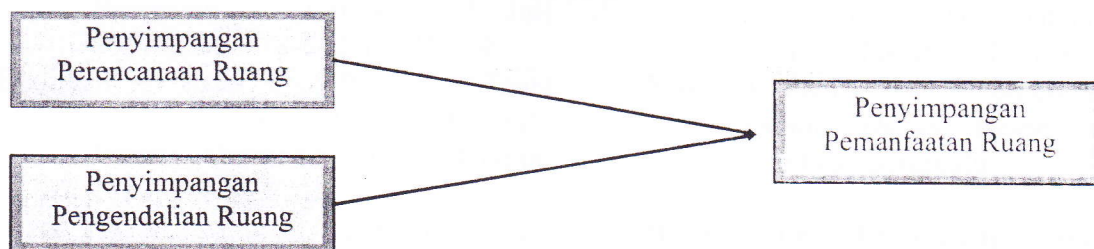
Sumber : Hasil analisis penelitian (2011).



Berdasarkan tabel diatas, bahwa faktor-faktor penyebab penyimpangan pemanfaatan ruang berupa alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis di kawasan Danau Dusun Besar kota Bengkulu terjadi akibat adanya penyimpangan dalam proses penataan ruang yang lainnya sejak

perencanaan ruang sampai dengan pengendalian ruang, sehingga penyimpangan pemanfaatan ruang merupakan akibat dari penyimpangan-penyimpangan sebelumnya dalam proses penataan ruang, sebagaimana terdapat di dalam bagan 1 dibawah ini.

Bagan 1. Penyimpangan dalam Penataan Ruang



Sumber : Hasil analisis penelitian ( 2011)

Berdasarkan faktor-faktor penyebab penyimpangan pemanfaatan ruang berupa alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis, Penelitian ini menunjukkan bahwa penyimpangan pemanfaatan ruang terjadi juga disebabkan adanya penyimpangan dalam perencanaan ruang dan pengendalian ruang dalam penataan ruang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis di kawasan Dusun Besar : Pertama. Penyimpangan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis berawal dari adanya penyimpangan alih fungsi lahan yang terjadi dikawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar, Kedua. adanya kelalaian pembuat kebijakan dalam menetapkan PERDA RTRW yang tepat waktu, Ketiga. persaingan Pemanfaatan Ruang, dan Keempat lemahnya Pengendalian Ruang. Berdasarkan faktor-faktor penyebab penyimpangan pemanfaatan ruang berupa alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis, Penelitian ini menunjukkan bahwa

penyimpangan pemanfaatan ruang terjadi juga disebabkan adanya penyimpangan dalam perencanaan ruang dan pengendalian ruang dalam penataan ruang.

Dari kesimpulan diatas peneliti memberikan saran sebagai berikut : 1. Agar dilakukan pengembalian fungsi kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar oleh berbagai pihak yang berwenang dan berkepentingan. 2. Agar adanya Perda RTRW yang baru, sesuai dengan Undang-Undang tentang Penataan Ruang, Sumber Daya Air dan Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan 3. Agar adanya PERDA tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai turunan dari UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 4. Agar pemerintah daerah dan masyarakat dapat meningkatkan peran partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. 5. Agar semua pihak bisa melaksanakan kewenangannya masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun secara horizontal.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Jurnal, Prosiding

- Astuti UP, Wibawa W, Ishak A. *"Faktor yang mempengaruhi alih fungsi Lahan pangan menjadi kelapa sawit di Bengkulu : kasus petani di desa Kungkai baru. Prosiding Seminar Nasional Budidaya Pertanian. Urgensi dan Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian"*. Bengkulu 7 Juli 2011. ISBN 978-602-19247-0-9
- Budiman Arief. 1995. *"Teori pembangunan Dunia Ketiga"*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Catur TB, Purwanto J, Uchyani RF dan Susi WA. *"Dampak alih fungsi lahan pertanian ke sektor non pertanian Terhadap ketersediaan beras di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah"*. J.Caraka Tani. 2010.Vol. 25 (1):38-42.
- Dokumen Laporan Tahunan Penggunaan Lahan Dinas Pertanian & Peternakan kota Bengkulu 2006-2010.
- Ernawi S, Imam. 2008. *"Kebijakan Penataan Ruang Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 Dalam Rangka Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum"*. Jakarta. Dirjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum.
- Harian Rakyat Bengkulu. 2011. Liputan Khusus *"Polemik Alih Fungsi Lahan Pertanian"* Bengkulu.
- Miles, Matthew B., dan Huberman, A. Michael. 1992. *"Analisa Data Kualitatif"*. (Terjemahan Tjetjep Rohidi). Jakarta. UI Press.
- Yasin, Usman. 2009. *"Potensi Kawasan Danau Dusun Besar"* Yayasan Lembak. Bengkulu.

### B. Peraturan-Perundang-Undangan

- Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 1995 dan 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Bengkulu.